

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta membuka peluang yang lebih luas bagi generasi muda. Namun, di beberapa negara yang mengalami konflik berkepanjangan yang membuat negara belum mampu memberikan pendidikan yang adil dan memadai bagi seluruh warganya (Abdillah Said, 2024).

Salah satu negara yang menghadapi tantangan besar dalam sektor pendidikan adalah Afghanistan. Konflik yang berkepanjangan, ketidakstabilan politik, dan keterbatasan sumber daya telah menyebabkan banyak anak di Afghanistan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kembalinya Taliban sebagai pemerintahan *de facto* Afghanistan pada Agustus 2021 menyebabkan krisis terhadap sistem pendidikan Afghanistan. Pemerintahan *de facto* sendiri merupakan situasi dimana Taliban memiliki kekuasaan dalam pemerintahan Afghanistan, tetapi tidak memiliki kedaulatan secara hukum. Hanya berselang satu bulan, Taliban kembali mengimplementasikan kebijakan yang membatasi pendidikan bagi anak perempuan. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh OCHA pada tahun 2023, terdapat setidaknya 1,4 juta anak

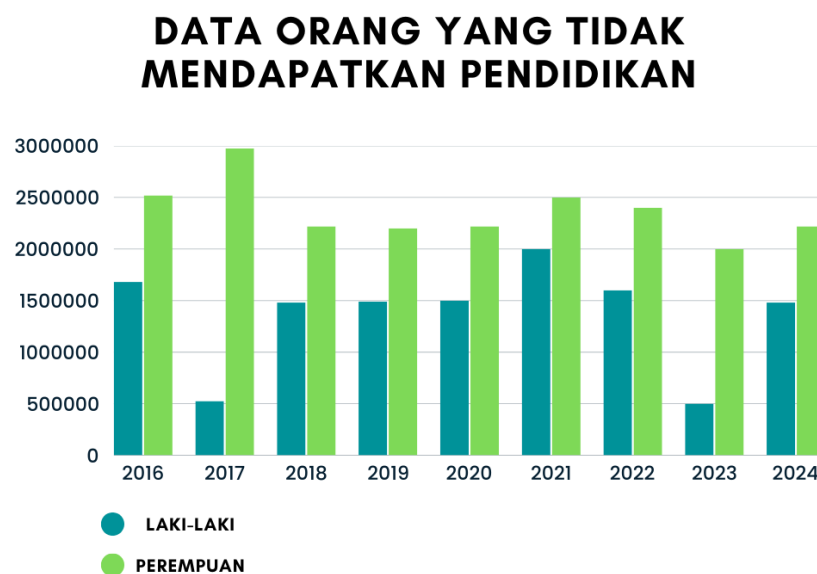
perempuan yang terdampak oleh kebijakan pembatasan pendidikan sejak diberlakukannya pada tahun 2021 (OCHA, 2023).

Dalam sektor pendidikan, kebijakan pembatasan pendidikan bagi perempuan tersebut berdampak pada berkurangnya tenaga pengajar di Afghanistan yang mayoritas merupakan perempuan, sehingga banyak sekolah yang memutuskan untuk menghentikan aktivitasnya. Tanpa pengurangan jumlah guru pun, tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi akademik minimum hanya 48% (UNICEF Afghanistan, n.d.). Akibatnya, kebijakan yang semula digunakan untuk merepresi perempuan juga dirasakan oleh siswa laki-laki yang terpaksa menghentikan pendidikannya. Kondisi itu diperburuk oleh kemiskinan yang mendorong keluarga untuk memprioritaskan kebutuhan sehari-hari dibandingkan pendidikan, sehingga banyak anak laki-laki usia sekolah yang memilih atau terpaksa ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (OCHA, 2023).

Human Rights Watch melaporkan bahwa lebih dari 10.000 warga sipil Afghanistan, menjadi korban tewas atau terluka akibat konflik. Kekerasan dan kemiskinan ekstrem juga mengakibatkan banyak orang putus sekolah, dengan 44% orang Afghanistan tidak memiliki akses pendidikan (HRW, 2023). Selain itu, lebih dari 1.000 sekolah ditutup secara paksa karena kondisi yang tidak aman, memengaruhi lebih dari 545.000 anak pada waktu yang bersamaan. Jutaan orang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan akibat faktor ketidakamanan, perpindahan penduduk, dan kemiskinan (NRC, 2019).

Konflik kekerasan yang terjadi di Afghanistan juga menjadi hambatan untuk mengakses pendidikan, ditandai dengan minimnya jumlah sekolah dan transportasi

yang dapat digunakan oleh masyarakat. Di samping itu, kondisi geografis Afghanistan membuat negara tersebut rentan akan bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Berdasarkan situasi tersebut, mereka kesulitan untuk mengakses pendidikan, terlebih karena adanya kekhawatiran terhadap keselamatan di sekolah (UNICEF Afghanistan, n.d.).



Grafik 1. 1 Data Orang Yang Tidak Mendapatkan Pendidikan

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan grafik "Data jumlah orang di Afghanistan yang Tidak Mendapatkan Pendidikan di Afghanistan" dari tahun 2016 hingga 2024, terlihat fluktuasi yang mencerminkan dinamika sosial-politik dan peran bantuan internasional. Hal ini mencerminkan kekhawatiran global terhadap pembatasan pendidikan, yang kembali diberlakukan secara bertahap oleh rezim baru. Data ini menegaskan bahwa akses pendidikan di Afghanistan sangat dipengaruhi oleh situasi politik dan keterlibatan komunitas internasional.

Afghanistan pada Human Development Index (HDI) menempati peringkat ke-182 dari 193 negara yang dinilai, menunjukkan tantangan signifikan dalam sektor pendidikan yang dihadapi negara tersebut, termasuk rendahnya tingkat melek huruf, terbatasnya akses terhadap pendidikan berkualitas, serta dampak berkepanjangan dari konflik dan ketidakstabilan politik yang semakin memperburuk kondisi sistem pendidikan di negara tersebut (Global Partnership, 2016). Pada tahun 2022, tingkat melek huruf di Afghanistan tercatat sebesar 37,3%, yang mencerminkan kesenjangan pendidikan yang signifikan di negara tersebut. Dari jumlah tersebut, hanya 22,6% perempuan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, sementara angka melek huruf pada laki-laki mencapai 52,1%. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perempuan Afghanistan menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memperoleh pendidikan formal (UNESCO).

Minimnya akses pendidikan di Afghanistan, terlebih pasca kembalinya pemerintahan Taliban di tahun 2021, mendorong berbagai organisasi internasional untuk merancang program dengan tujuan mendukung sistem pendidikan di Afghanistan, tanpa terkecuali UNESCO. Sejak Afghanistan bergabung dengan UNESCO pada tahun 1948, UNESCO secara aktif menginisiasi program kerja untuk mendukung dan menjamin pembangunan sistem pendidikan di Afghanistan (UNESCO, n.d.). Hal tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dengan berbagai mitra pendidikan lainnya guna meningkatkan efektivitas program UNESCO di Afghanistan. Akan tetapi, dengan perubahan situasi politik di Afghanistan akibat kembalinya pemerintahan Taliban, UNESCO perlu untuk menyesuaikan programnya demi menjamin pendidikan yang di Afghanistan. Oleh karena itu,

penelitian ini selanjutnya mengidentifikasi upaya UNESCO dalam menangani permasalahan pendidikan di Afghanistan tahun 2021-2024.

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada studi sebelumnya yang relevan untuk mendukung proses penelitian. Beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti antara lain. Literatur pertama adalah penelitian berjudul “Peran UNICEF dalam Mendukung Pendidikan Perempuan di Afghanistan Tahun 2021-2023”. Ditulis oleh Rahajeng Amaragati Aryono yang membahas terkait peran UNICEF dalam mendukung Pendidikan perempuan di Afghanistan pada periode 2021-2023. Pada penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep organisasi internasional oleh Clive Archer. Melalui analisis berdasarkan konsep organisasi internasional.

Yang kedua berjudul “Challenges to Afghan Refugee Children’s Education in Pakistan: A Human Security Perspective” tahun 2021. Ditulis oleh Asifa Jahangir dan Furqan Khan membahas terkait tantangan pendidikan yang dihadapi anak-anak pengungsi Afghanistan di Pakistan melalui lensa keamanan manusia. Pada penelitian ini, kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep keamanan manusia oleh Hans Morgenthau. Adapun perbedaan pada tantangan pendidikan anak-anak pengungsi Afghanistan di Pakistan dari sudut pandang keamanan manusia, sedangkan penelitian ini membahas upaya UNESCO dalam menangani masalah pendidikan di dalam wilayah Afghanistan.

Yang ketiga berjudul “Education and fragility in Afghanistan A situational analysis” tahun 2009. Ditulis oleh Morten Sigsgaard membahas terkait kerapuhan Afghanistan antara sistem pendidikan dan kondisi kerentanan negara akibat konflik

berkepanjangan dan ketidakstabilan politik. kerangka teoritis yang digunakan adalah konsep *fragility*. Afghanistan telah dijuluki sebagai “negara rapuh yang hakiki”. menemukan bahwa sistem pendidikan di Afghanistan sangat dipengaruhi oleh kondisi fragilitas negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat upaya UNESCO dalam menangani pendidikan anak di Afganistan. maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis adalah “Bagaimana upaya UNESCO dalam menangani pendidikan di Afghanistan di tahun 2021-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya yang dilakukan UNESCO dalam menangani pendidikan di Afghanistan khusus nya di tahun 2021-2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Implementasi Organisasi Internasional

Implementasi organisasi internasional (OI) merujuk pada upaya nyata untuk menerjemahkan perjanjian internasional menjadi kebijakan konkret, seperti pengesahan undang-undang, pembentukan lembaga, atau adopsi regulasi baik domestik maupun internasional (Victor *et al.*, 1998). OI dapat berperan dalam memantau, mendukung, atau bahkan melaksanakan perjanjian, serta memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. OI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen negara, tetapi juga dapat mempengaruhi jalannya peristiwa internasional (Joachim *et al.*, 2007).

Hawkins *et al.* (2006) berpendapat bahwa OI juga berperan penting dalam implementasi, melihat negara-negara semakin banyak mendelegasikan pelaksanaan perjanjian dan kebijakan internasional kepada OI. Pada implementasi, berbagai aktor berperan dalam tindakan konkret yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pejabat negara untuk memenuhi perjanjian internasional, dimana OI dapat menjadi salah satu aktor tersebut, yang mungkin telah diberikan kewenangan oleh negara (Joachim *et al.*, 2007).

Menurut Joachim *et al.* (2007), ada tiga pendekatan utama dalam implementasi kebijakan organisasi internasional. pendekatan yang meliputi *enforcement approach*, *managerial approach* dan *normative approach*. Penelitian ini berfokus pada salah satu variabel dalam implementasi organisasi internasional, yaitu *management approach*, untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana implementasi dilakukan oleh organisasi internasional yang menjadi objek kajian.

1.4.1.1 *Enforcement approach*

Pendekatan ini berpendapat bahwa implementasi dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional paling efektif ini dijamin melalui mekanisme koersif (Downes et al., 1996) mengemukakan bahwa "strategi hukuman sudah cukup untuk menegakkan perjanjian ketika masing-masing pihak menyadari bahwa jika mereka melanggar, mereka mengalami kerugian akibat hukuman tersebut sehingga manfaat bersihnya tidak positif." (Joachim *et al.*, 2007)

Enforcement approach memiliki asumsi bahwa OI dapat memengaruhi dan memastikan implementasi suatu perjanjian jika mereka memiliki mekanisme koersif yang memadai. Dua instrumen utama yang penting dalam hal ini adalah *naming* dan *shaming* serta penerapan sanksi. *Naming and shaming* merujuk pada pemantauan yang memiliki fungsi untuk meningkatkan transparansi antara negara-negara yang terlibat dalam perjanjian juga memastikan pendeteksian pelanggaran. sedangkan sanksi berfungsi untuk menghukum negara yang melakukan pelanggaran (Joachim, Reinalda & Verbeek, 2007).

1.4.1.2 *Managerial approach*

Chayes dan Chayes (1995) berpendapat bahwa dalam *managerial approach* didominasi oleh kerjasama antar negara-negara serta aktor-aktor yang terlibat (Joachim, Reinalda Verbeek, 2007). Dalam pendekatan ini, organisasi internasional berperan lebih aktif dalam membantu negara-negara untuk melaksanakan komitmen mereka. Menurut pendekatan ini, organisasi internasional, melalui birokrasi dan lembaga-lembaganya, dapat memainkan peran kunci dalam implementasi, karena mereka dapat membantu negara-negara

untuk membangun kapasitas dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan (Haas et al., 1993). Selain itu, OI juga dapat membantu dalam menafsirkan atau menjelaskan bagian-bagian tertentu dari suatu perjanjian (Joachim et al., 2007).

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu *monitoring*, *capacity building*, dan *problem solving*. *Monitoring* dilakukan melalui pelaporan, di mana negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional diwajibkan untuk memberikan laporan status secara berkala mengenai implementasi di tingkat nasional kepada badan internasional yang memantau pelaksanaan perjanjian tersebut. Dalam situasi tertentu, perjanjian tersebut dapat membentuk sebuah komite khusus yang bertugas meninjau laporan-laporan tersebut dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada negara-negara mengenai langkah-langkah yang perlu diambil. Yang kedua, *capacity building* dilakukan oleh aktor-aktor dalam organisasi internasional untuk membantu negara-negara membangun kapasitas yang diperlukan guna melaksanakan langkah-langkah yang sesuai.

Terakhir, *problem solving* dalam hal ini melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada negara-negara yang membutuhkan. Bantuan ini membantu negara-negara mengatasi tantangan yang ada dalam implementasi perjanjian internasional. Dengan memberikan bantuan teknis dan finansial atau menyediakan tenaga ahli, organisasi internasional dapat menekankan proses pemecahan masalah (Joachim et al., 2007).

1.4.1.3 *Normative approach*

Pada pendekatan ini kekuatan normatif OI mempengaruhi negara untuk mematuhi perjanjian internasional didasarkan pada pendekatan konstruktivis, yang menekankan bahwa otoritas OI merupakan sumber daya yang penting. Menurut Barnett dan Finnemore (1999) otoritas OI berasal dari dua sumber, pertama otoritas tersebut berasal dari penguasaan informasi dan keahlian. Pengetahuan teknis yang mendalam, pelatihan, serta pengalaman memungkinkan organisasi internasional (OI), birokrasi, atau lembaga terkait untuk melaksanakan perjanjian dengan lebih efektif dan memberikan keunggulan dibandingkan faktor lain yang memiliki keterbatasan informasi. Kedua, otoritas OI juga didukung oleh citra mereka sebagai lembaga yang rasional dan tidak berpihak (Joachim *et al.*, 2007).

Menurut Risse (2002) *normative approach* percaya bahwa alih-alih menggunakan paksaan atau mengelola implementasi secara langsung, OI lebih mengandalkan argumen rasional untuk meyakinkan negara bahwa memenuhi komitmen internasional mereka adalah tindakan yang tepat dan benar (Joachim, Reinalda & Verbeek, 2007).

Dari ketiga pendekatan, *enforcement approach*, *management approach*, dan *normative approach*, *management approach* lebih umum digunakan dalam penelitian terdahulu yang membahas peran organisasi internasional dalam mengatasi masalah pendidikan, dilakukan dengan pengelolaan sumber daya, koordinasi lintas sektor, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas untuk memastikan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif (Fahmi, N. 2023). Dalam konteks ini, implementasi upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan

manajerial yang menekankan peran organisasi internasional sebagai manajer dalam mendukung negara-negara anggota dalam menerapkan kebijakan internasional (Fahmi, N. 2023). Kegagalan suatu negara dalam melaksanakan implementasi seringkali disebabkan oleh keterbatasan finansial, administratif, atau teknis, bukan karena penolakan terhadap norma-norma internasional yang telah disepakati. Dalam situasi tersebut, organisasi internasional dapat melakukan intervensi dengan cara yang bersifat membantu dan tidak memaksa.

1.4.2 Konsep Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses yang sengaja dibuat secara terstruktur atau tersistematis untuk menciptakan lingkungan serta pengalaman untuk belajar yang mendorong seseorang mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Aspek-aspek tersebut antara lain adalah aspek spiritual, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, moral, hingga keterampilan dasar yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu kehidupannya pribadi maupun kehidupan bersosial. Keterampilan yang didapatkan melalui pendidikan diharapkan dapat berguna bagi individu tersebut dan masyarakat (Abd Rahman. et al, 2022)

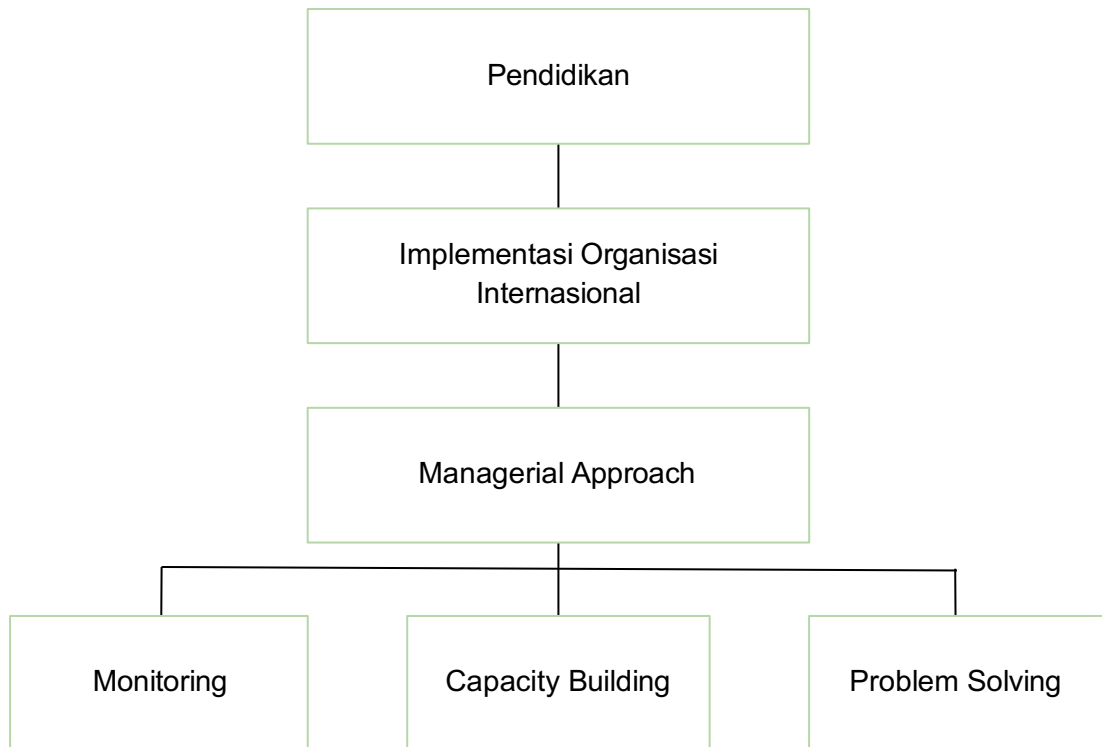
Menurut Connie L. McNeely di dalam tulisannya yang berjudul *Prescribing National Education Policies: The Role of International Organizations*, pendidikan adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang membuka pintu mengenai nilai-nilai yang dunia anggap penting, yang sudah menjadi hak dasar manusia dan menjadi alat utama untuk membangun ataupun memajukan sebuah negara. Pendidikan diibaratkan sebagai cermin yang menunjukkan bahwa sebuah negara itu bisa saja sudah maju, masih berkembang, atau pantas diakui oleh global.

Pendidikan menurut McNeely bukan hanya untuk membuat sebuah negara menjadi maju, tetapi juga telah menjadi bagian dari tatanan global yang menunjukkan nilai-nilai modern, seperti keteraturan dan kemajuan (McNeely, 1995).

Banyak negara baik yang masih berkembang maupun maju berlomba-lomba mengikuti sistem pendidikan Barat yang terlihat modern dan agar dapat diakui secara global (McNeely, 1995). Namun, di negara berkonflik sistem pendidikan global sering kali tidak cocok dengan kondisi lokal yang serba tidak stabil. Fasilitas pendidikan yang ada di negara berkonflik tersebut seringkali dihancurkan atau bahkan dijadikan basis militer, yang membuat pendidikan tidak dapat berjalan lancar. Pendidikan juga dijadikan sebagai alat propaganda atau diskriminasi, dan hal ini membuat sistem pendidikan ‘standar global’ sulit diterapkan jika realitas di dalam negara tersebut kacau ataupun penuh ancaman (Salih, 2023). Banyak negara berkembang yang tidak mampu menyediakan kebutuhan pendidikan secara mandiri. McNeely berkata bahwa pendidikan sekarang ini tak hanya tentang mengajari seseorang baca dan tulis, tetapi juga menjadi sebuah simbol kemajuan dan bukti untuk negara itu “layak” di mata dunia.

Sistem pendidikan yang biasanya digunakan membawa nilai-nilai seperti kesetaraan, demokrasi, dan semangat warga internasional. Pendidikan tak lagi hanya urusan dalam negeri saja, dengan contoh banyaknya organisasi, baik itu *non-governmental organization* ataupun organisasi internasional seperti PBB, UNESCO, dan *World Bank* yang rajin menyebarkan nilai-nilai dan aturan pendidikan kepada negara-negara anggotanya tanpa peduli seperti apa kondisi ekonomi dan politik dari negara tersebut (McNeely, 1995).

1.5 Sintesa Pemikiran



Sumber : Penulis

Penelitian ini berawal dari adanya permasalahan pendidikan di Afghanistan yang semakin memburuk akibat konflik berkepanjangan dan perubahan rezim pemerintahan. Kondisi tersebut menyebabkan terbatasnya akses terhadap pendidikan. sehingga dibutuhkan implementasi organisasi internasional melalui *management approach*. Melalui pendekatan ini terdapat indikator *monitoring*, *capacity building* dan *problem solving* Ketiga indikator ini menjadi alat analisis dalam menilai sejauh mana upaya organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan.

1.6 Argumentasi Utama

Berdasarkan penguraian latar belakang, rumusan masalah serta teori, penulis memiliki argumen utama yaitu upaya yang dilakukan oleh UNESCO dalam menangani pendidikan pada anak di Afghanistan adalah dengan management approach. UNESCO dalam melakukan *monitoring* terhadap pendidikan di Afghanistan berkoordinasi dengan Dewan Eksekutif UNESCO, Development Partners Group (DPG), dan Kelompok Kerja Pendidikan. Melalui rangkaian pertemuan Dewan Eksekutif ke-214 hingga ke-220 (2021–2024), untuk memantau rencana sektor pendidikan yang kuat, serta sumber belajar untuk pendidikan dasar formal, pendidikan non-formal untuk orang dewasa, serta pendidikan tinggi dan riset.

Selanjutnya, dalam *capacity building* dan *problem solving*, UNESCO berupaya pada penguatan sistem pendidikan Afghanistan melalui pengembangan kapasitas guru, penyediaan pendidikan alternatif, serta pemberian bantuan teknis dan finansial. Melalui Kantor UNESCO di Kabul, program seperti Literacy and Learning Possibilities dan Community-Based Education (CBE) dijalankan untuk memperluas akses pendidikan dan masyarakat di wilayah terpencil, terutama di daerah konflik. UNESCO juga meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan pedagogi digital dan pengajaran berbasis radio, serta bekerja sama dengan mitra internasional seperti Pemerintah Swedia (SIDA), Jepang, USAID, dan Bank Dunia dalam program Capacity Development for Education (CapED), Better Education Systems for Afghanistan's Future (BESAF), dan Accelerated Non-Formal Education Programme (ANEP). Bantuan yang diberikan UNESCO kepada Afghanistan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan

yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, guna mendukung pembangunan sumber daya manusia dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di negara tersebut.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis fenomena secara sistematis dan holistik. (Sugiyono, 2013). Dengan tipe penelitian dan studi kasus yang telah dipilih sebelumnya, maka penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya UNESCO dalam menangani pendidikan periode tahun 2021-2024.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan waktu penelitian untuk memastikan fokus yang jelas terhadap periode yang diteliti. Rentang waktu yang dikaji mencakup tahun 2021 hingga 2024. Tahun 2021 dipilih sebagai titik awal karena sejak saat itu terjadi penurunan drastis dalam jumlah siswa yang bersekolah. Sejak rezim Taliban kembali berkuasa di Afghanistan, terjadi penurunan signifikan dalam jumlah siswa yang mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai kebijakan yang membatasi akses mereka ke institusi pendidikan. Karena

keterbatasan data penelitian yang tersedia, peneliti hanya melakukan analisis hingga tahun 2024 untuk memastikan bahwa penelitian ini didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembatasan ini dilakukan agar hasil penelitian tetap relevan dengan kondisi terkini serta menghindari spekulasi yang tidak didukung oleh data yang memadai. Selain itu, keterbatasan dalam akses terhadap sumber informasi yang lebih baru juga menjadi faktor yang mempengaruhi ruang lingkup penelitian ini.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pengumpulan data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti observasi langsung, wawancara mendalam, studi kasus, serta analisis literatur dan sumber kepustakaan (Moleong, 2016). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi tambahan. Data sekunder yang digunakan mencakup laporan resmi yang diterbitkan oleh situs web resmi (United Nations), UNESCO, serta berbagai artikel penelitian dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini merupakan suatu proses dalam mengelola, mengevaluasi, serta menginterpretasikan data non-numerik agar dapat diubah menjadi informasi yang bermakna atau pola tertentu yang dapat digunakan sebagai dasar dalam memahami

suatu fenomena atau perkembangan tertentu (Majid, 2017). sehingga dapat memaparkan bagaimana upaya UNESCO dalam menangani pendidikan.

1.7.5 Sistematis Penulisan

BAB I : terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian baik secara umum dan secara khusus, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II : berisi upaya UNESCO menangani pendidikan di Afghanistan dengan *management approach* melalui *monitoring*.

BAB III : berisi upaya UNESCO menangani pendidikan di Afghanistan dengan *capacity building* dan *problem solving*.

BAB IV : berisi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.